



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGARUH KENDALA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE: PERAN DEWAN DIREKSI WANITA DAN INDEPENDENT COMMISSIONERS SEBAGAI PEMODERASI

THE INFLUENCE OF FINANCIAL CONSTRAINTS ON TAX AVOIDANCE: THE ROLE OF FEMALE ON BOARDS AND INDEPENDENT COMMISSIONERS AS MODERATIONS

Rahmawati Yulijah Nurmah^{1*}, Alfiati Silfi², Rheny Afriana Hanif³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email: rahmawati.yulijah6431@student.unri.ac.id

Keywords

Tax Avoidance, Financial Constraints, Female on Boards, Independent Commissioners

Article informations

Received:

2024-06-06

Accepted:

2024-10-30

Available Online:

2024-11-30

Abstract

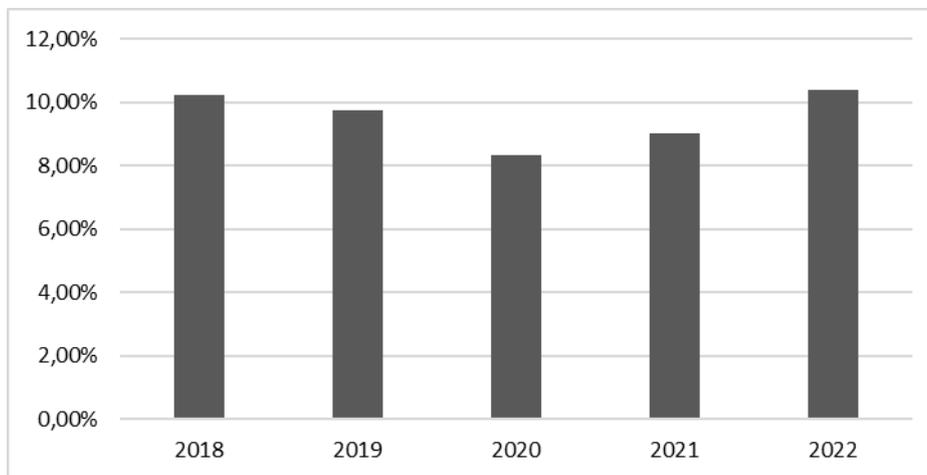
Companies use tax avoidance as a tactic to reduce the amount of taxes they must pay. In the meanwhile, taxes are income that needs to be collected as much as feasible by the state. According to agency theory, tax evasion is the result of disparities in interests between businesses and the government. In response to the problem of tax evasion, this study is to investigate and evaluate the impact of financial limitations on tax evasion, taking into account moderating factors such as the presence of female directors and independent commissioners in manufacturing businesses listed between 2018 and 2022 on the Indonesian Stock Exchange. Purposive sampling was the sampling strategy employed in this study, which produced a sample of 76 businesses. Using the IBM SPSS Statistics 25 program, multiple linear regression analysis and moderated regression analysis are the data analysis techniques employed for each moderating variable. The test results involving the control factors (profitability, leverage, firm size, and number of commissioners on the board) indicate that tax evasion is impacted by each of the control variables. The study's findings demonstrate that tax evasion is influenced by financial limitations. Then, financial restrictions that are controlled by independent commissioners and women on boards have an impact on tax evasion.

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai sumber pendapatan negara yang dihasilkan dari dan untuk rakyat, penerimaan pajak merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan. Pemerintah prihatin dengan fluktuasi rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir. Menurut data Kementerian Keuangan dari tahun 2018 hingga 2022, Indonesia memiliki rasio pajak yang relatif rendah. Sebuah metrik yang disebut rasio pajak (tax ratio) digunakan untuk mengevaluasi porsi pendapatan pajak nasional dengan membandingkan pendapatan pajak terhadap produk domestik bruto.



Data statistik Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak untuk tahun 2018 adalah 10,24%. Rasio pajak turun 0,48% pada tahun 2019 menjadi 9,76%. mengalami penurunan tajam sebesar 1,43% pada tahun 2020, menghasilkan rasio pajak 8,33%. Selanjutnya, terdapat kenaikan rasio pajak sebesar 0,78% pada tahun 2021, sehingga rasiopajak menjadi 9,11%. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 1,29%, menghasilkan rasio pajak senilai 10,40% (<https://www.kemenkeu.go.id>).



Gambar 1
Rasio Pajak di Indonesia 2018 – 2022

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Tahun 2020, rasio pajak Indonesia mengalami penurunan yang drastis sebagai akibat dari penerimaan pajak Indonesia yang menurun tajam sebagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi (Kartini & Jaya, 2023). Selain itu, penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu teknik manajemen pajak yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan rasio pajak. Rendahnya persentase pajak di Indonesia merupakan hasil dari metode penghindaran pajak, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Revenue Statistics in Asia and Pacific Economies 2020 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Tax avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak sehingga mendapat keuntungan dari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang relevan untuk mengurangi atau meringankan jumlah pajak yang harus dibayar secara sah (Hama, 2020:10). Karena kurangnya peraturan yang mengatur penghindaran pajak, banyak perusahaan di Indonesia, terutama di sektor industri, terlibat dalam kegiatan ini. Perusahaan yang terlibat dalam proses mengubah barang dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dapat dijual dan menghasilkan pendapatan dikenal sebagai perusahaan manufaktur (Sukamulja, 2019:249). Menurut data Kementerian Keuangan, sektor manufaktur menyumbang persentase tertinggi (27,3%) terhadap penerimaan pajak tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.523,7 triliun, atau 80,65% dari target penerimaan pajak (<https://www.kemenkeu.go.id>). Akibatnya, sektor industri Indonesia membayar pajak paling besar. Pemerintah mengkhawatirkan perusahaan manufaktur jika pendapatan pajak menurun karena kontribusinya yang signifikan.

Masalah perusahaan manufaktur yang terlibat dalam metode penghindaran pajak adalah salah satu yang mempengaruhi perusahaan agrifood, seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, yang operasinya meliputi pakan ternak, peternakan ayam, akuakultur, pengolahan hewan, dan peternakan sapi. Menyusul dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan Mei 2020 dengan Nomor Perkara 2666/B/PK/Pjk/2020, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diharuskan melunasi tunggakan



pajak yang belum dibayar senilai 23,944 miliar rupiah. Hal yang dipermasalahkan adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan menurut Pasal 26 sebesar 20% yang diterapkan atas pembayaran bunga senilai enam belas miliar rupiah. Ketidaksepakatan antara Comfees Trading Netherlands dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengenai siapa pemilik manfaat dari nilai yang dipersengketakan menimbulkan sengketa PPh Pasal 26. Untuk mendapatkan CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini.

fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Indonesia dan Belanda harus memiliki status *beneficial owner*. Dalam skenario ini, fasilitas DTAA digunakan sebagai celah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Akibatnya, melalui Comfeed Trading BV, sebuah perusahaan Belanda, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dianggap telah melakukan praktik *tax avoidance*.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan pemegang saham yang memperoleh *beneficial owner* dari pendapatan bunga pinjaman tersebut melalui pembagian dividen, maka majelis hakim berhasil meyakinkan pengadilan bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dan bukan Comfeed Trading BV Belanda, yang merupakan pemilik manfaat yang sebenarnya. Oleh karena itu, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk ditetapkan memiliki kewajiban pajak senilai 23,944 miliar rupiah yang ditetapkan berdasarkan peraturan PPh di negara tempat Perusahaan tersebut memperoleh penghasilan bunga (<https://nasional.sindonews.com>).

Dari kasus yang telah dijelaskan, terlihat jelas bahwa perusahaan memanfaatkan *tax avoidance* sebagai metode untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax avoidance* adalah taktik perencanaan pajak yang disusun berdasarkan berbagai variabel. Penelitian ini menguji variabel-variabel tersebut, yaitu *financial constraint*, yang berdampak pada timbulnya *tax avoidance*. Pengaruh *financial constraints*, atau juga disebut kendala keuangan, terhadap taktik *tax avoidance* pada industri manufaktur yang tercatat dalam BEI antara tahun 2018 hingga 2022 juga diantisipasi dipengaruhi oleh variabel lain, seperti keberadaan anggota dewan direksi wanita dan *commissioner independent*.

Faktor pertama yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah kendala keuangan. Ketidakmampuan perusahaan untuk mengumpulkan dana dari sumber-sumber pendanaan investasi yang dapat diakses disebut sebagai *financial constraints* (Foda, dkk, 2022:14). Kendala keuangan dapat berdampak pada *tax avoidance* karena memaksa perusahaan untuk mencari cara lain untuk menghemat uang sambil tetap memenuhi tanggung jawab mereka. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat mengurangi kewajiban pajak mereka dan meningkatkan efisiensi dengan menghemat uang. Penelitian yang dilakukan oleh Oktarina (2023) menghasilkan Kesimpulan bahwa “kendala keuangan berkontribusi terhadap perencanaan *tax avoidance*.” Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* merupakan taktik perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Di sisi lain, penelitian lain oleh Bayar, dkk (2018) menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak terpengaruh oleh kendala keuangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan yang memiliki kendala keuangan akan mengambil terlalu banyak risiko ketika menggunakan teknik *tax avoidance* untuk mengatasi masalah keagenan.

Selain kendala keuangan, faktor lain yang berperan sebagai variabel moderasi terhadap taktik *tax avoidance* adalah *female on boards* atau dewan direksi wanita. Dewan direksi wanita dalam konteks *diversity in organization* merupakan metode untuk mengidentifikasi berbagai pengaturan dan memahami prasangka di tempat kerja (Robbins & Judge, 2015:17). Di saat perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan terdapat kesenjangan gender, laki-laki lebih cenderung menjadi pengambil risiko (*risk-taker*) daripada perempuan, dan hal ini tercermin dari cara laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan (*risk-averse*), termasuk dalam hal perpajakan. Diperkirakan bahwa interaksi antara kendala keuangan dan *tax avoidance* akan meningkatkan atau mengurangi representasi perempuan di dewan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hudha dan Utomo Cahyo (2021)

membuktikan bahwa “dewan direksi wanita memiliki pengaruh berkaitan dengan karakter dan sifat alami wanita yang cenderung mencari aman sehingga peningkatan jumlah dewan direksi dengan gender wanita akan menurunkan tingkat tax avoidance”. Sementara itu, studi lain yang dilakukan Mala dan Ardiyanto (2021) menghasilkan kesimpulan “dewan direksi wanita tidak berdampak secara signifikan karena pemilihan dewan direksi perusahaan dilakukan atas dasar profesionalitas, bukan mempertimbangkan gender”.

Di samping kendala keuangan dan dewan direksi wanita, faktor moderasi lainnya yang berperan dalam praktik tax avoidance oleh perusahaan ialah independent commissioners. Independent commissioners merupakan anggota dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis atau hubungan lain yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk bertindak secara independen atau secara eksklusif demi kepentingan terbaik perusahaan, serta mereka yang tidak memiliki keterkaitan dengan anggota komisaris lain, pihak manajemen perusahaan, atau pemegang saham mayoritas (KNKG, 2013:12). Pengaruh independent commissioners dalam memoderasi variabel kendala keuangan terhadap tax avoidance diantisipasi untuk terjadi karena peran pengawasan komisaris bersifat independen dari perusahaan, sehingga memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap manajemen untuk lebih bijak dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perusahaan. Studi yang dilaksanakan oleh Feranika, dkk (2014) dan Eksandy (2017) membuktikan “independent commissioners memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance karena apabila suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen dengan jumlah sedikit maka independensinya rendah sehingga akan meningkatkan praktik tax avoidance, dan hal tersebut berlaku sebaliknya”. Adapun penelitian yang dijalankan oleh Muslim, dkk (2023) menghasilkan Kesimpulan “jumlah komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan tax avoidance perusahaan karena banyak perusahaan yang mendirikan dewan komisaris independen sebagai formalitas untuk mengikuti persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia”.

Studi ini dikembangkan berdasarkan studi yang telah dilaksanakan oleh Yulinda Oktarina (2023) mengenai peran moderasi keragaman gender dalam hubungan antara penghindaran pajak dan kesulitan keuangan, tata kelola, dan pengungkapan CSR. Beberapa faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi pada kebaruannya, termasuk penambahan variabel independent commissioners sebagai pemoderasi karena diantisipasi bahwa peran pengawasan komisaris independen akan memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Karena gender telah menjadi subjek dari banyak penelitian, maka variabel diversitas gender akan diubah untuk lebih berkonsentrasi pada dewan direksi wanita. Penelitian ini juga menggunakan beberapa tambahan variabel kontrol, yaitu profitabilitas atau return on aset (ROA), leverage atau debt to equity ratio (DER), ukuran perusahaan, dan jumlah dewan direksi. Variabel jumlah dewan direksi ditambahkan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan meningkatkan kemungkinan bahwa variabel dependen akan mendapatkan manfaat dari dampak yang obyektif dan independen.

Diharapkan dengan menjalankan penelitian ini, para akademisi mampu memberikan pengetahuan dengan literatur. Penelitian ini diharapkan mampu membantu para praktisi ekonomi dengan memberikan panduan praktis, khususnya bagi manajemen ketika menangani pajak dan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen saat mengambil keputusan yang dapat meningkatkan perusahaan di masa mendatang.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Hubungan kerja antara prinsipal, yang merupakan pemberi kerja, dan agen, yang membuat keputusan dan bekerja atas nama prinsipal, dijelaskan oleh ide ini. Pada kenyataannya, sering terjadi konflik (agency problem) ketika teori keagenan ini digunakan,



dengan manajemen berfungsi sebagai agen dan perusahaan sebagai prinsipal. Asimetri informasi (ketidakseimbangan dalam jumlah informasi yang dikendalikan oleh manajemen sebagai agen dan perusahaan sebagai principal) biasanya menjadi penyebab kesulitan keagenan karena hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi yang diberikan oleh manajer kepada pemilik. Menurut teori keagenan, kehadiran komisaris independen sebagai pihak eksternal yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perusahaan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi dan mengetatkan pengawasan manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris (Hanif & Odiatma, 2020).

Teori Sinyal (Signalling Theory)

Konsep ini membahas taktik dan metode yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai prospek masa depan mereka dengan mengirimkan sinyal kepada pihak luar. Laporan keuangan yang memberikan rincian penting tentang situasi perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa depan serta mencirikan keberadaannya sering kali merupakan informasi (sinyal) yang dikirimkan perusahaan kepada pihak luar. Setelah informasi tersebut disebar, pihak ketiga akan menilainya, terlepas dari apakah itu berita positif atau negative (Riyadi & Takarini, 2023).

Teori Nature (Nature Theory)

Hipotesis kodrati yang dibahas dalam cakupan studi gender, yang pertama kali dicetuskan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi pada tahun 1980-an, mengemukakan bahwa perbedaan gender merupakan hal yang melekat dan harus diterima apa adanya. Menurut gagasan ini, perbedaan biologis antara pria dan wanita menunjukkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Gagasan ini juga memperhitungkan fakta bahwa perempuan dan laki-laki masih dapat bertukar peran. Di sisi lain, posisi dan tugas tertentu harus diakui oleh kedua belah pihak karena pada dasarnya tidak dapat dipindahtangankan (Dalimoenthe, 2020:34).

Pengaruh Kendala keuangan terhadap Tax Avoidance

Dalam konsen teori agensi, terdapat penjelasan bahwa kendala keuangan menjadi salah satu faktor yang memotivasi manajemen untuk menjalankan praktik tax avoidance. Hal ini merupakan hasil dari pengejaran kepentingan pribadi manajemen yang terus menerus dengan mengorbankan tugasnya untuk bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menjadi katalisator terciptanya konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang mengalami kendala keuangan akan berusaha mengumpulkan dana internal untuk mempertahankan operasi. Mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi tax avoidance selama jumlah uang yang dibayarkan minimal dan memungkinkan mereka mengumpulkan dana untuk memenuhi komitmen mereka. Inilah hubungan antara kendala keuangan dan tax avoidance (Oktarina, 2023).

Hasil penelitian yang dilaksanakan" Oktarina (2023) dan Sadjiarto, dkk (2020) menyatakan bahwa "kendala keuangan berdampak signifikan terhadap praktik tax avoidance karena kendala keuangan akan memotivasi perusahaan untuk melakukan tax avoidance dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perusahaan". Hal ini terjadi karena margin keuntungan perusahaan akan terpengaruh oleh pajak sebagai biaya yang menyebabkan arus kas keluar.

H₁: Kendala keuangan Berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Dewan direksi wanita dalam Memoderasi Kendala keuangan terhadap Tax Avoidance

Teori nature menyatakan bahwa terlepas dari perbedaan kodrat pria dan wanita, perbedaan dalam tanggung jawab dan tugas dapat dilakukan secara demokratis. Diperkirakan akan ada dewan direksi wanita dan hal ini akan memoderasi hubungan antara tax avoidance dan dewan direksi wanita karena perusahaan yang memiliki keterbatasan keuangan akan berusaha menjaga operasi mereka tetap berjalan dengan membayar pajak sesedikit mungkin untuk meningkatkan pendapatan. Ketika ada direktur wanita yang berhati-hati terhadap risiko, mereka akan membuat penilaian yang lebih lambat dan lebih hati-hati, terutama dalam hal uang (Liu, dkk, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liu, dkk (2022) menyatakan bahwa “dewan direksi wanita dapat berperan sebagai variabel moderasi karena dewan direksi wanita dapat mempertimbangkan tax avoidance sebagai strategi perencanaan pajak karena peraturan perpajakan yang tidak ketat.” Selanjutnya, hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hudha dan Utomo Cahyo (2021), Riguen, dkk (2020), dan Tanujaya dan Anggreany (2021) yang berpendapat bahwa “peningkatan jumlah wanita yang menempati posisi dewan direksi pada suatu perusahaan dapat berperan dalam menurunkan praktik tax avoidance”.

H₂: Dewan direksi wanita dapat berperan untuk memoderasi Kendala keuangan terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Independent Commissioners dalam Memoderasi Kendala keuangan terhadap Tax Avoidance

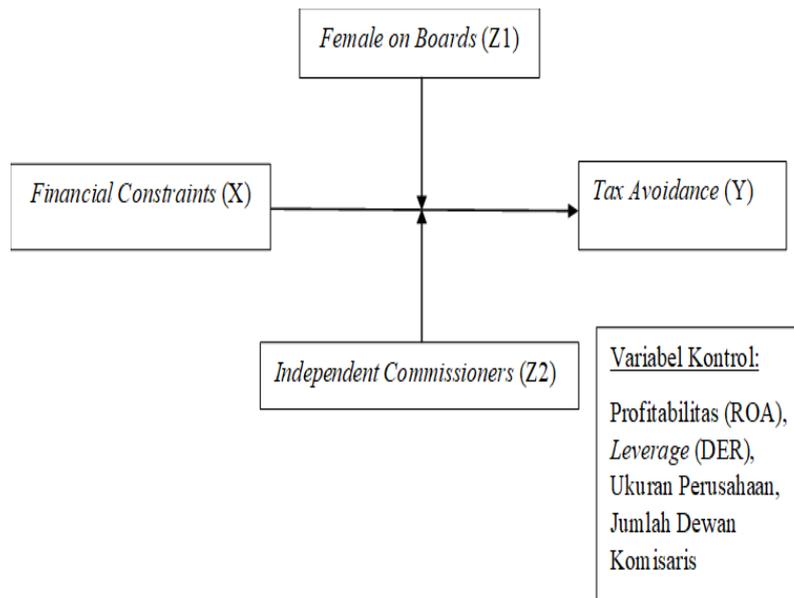
Komisaris independen mampu membantu keseimbangan informasi yang dikumpulkan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan teori sinyal sebagai dasar. Dengan didukung oleh teori keagenan, disarankan bahwa penyertaan komisaris independen, yang merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan bisnis, akan meningkatkan kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi manajemen. Karena perusahaan yang menghadapi pembatasan keuangan diharuskan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih hati-hati, maka komisaris independen diharapkan dapat bertindak sebagai moderator dari kendala keuangan dalam tax avoidance. Kehadiran dewan komisaris independen dapat mengurangi asimetri informasi dan memperketat pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen (Oktarina, 2023).

Studi yang dilakukan Winata (2014) dan Khoirunnisa (2014) menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa “komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terdapat penurunan praktik tax avoidance karena terdapat pengawasan ketat terhadap direksi dan manajemen, bukan hanya formalitas belaka”. Selanjutnya, sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilaksanakan Oktarina (2023) dan Damayanti, dkk (2022) yang membuktikan bahwa “peningkatan jumlah anggota komisaris independen akan menurunkan potensi terjadinya tax avoidance karena terdapat pengawasan yang objektif dan jujur dari komisaris independen sebagai pihak eksternal yang tidak terikat secara langsung ke perusahaan”.

H₃: Independent Commissioners dapat Memoderasi Kendala keuangan terhadap Tax Avoidance.

Mengacu pada hipotesis yang telah disebutkan, penelitian ini jika dijelaskan melalui model seperti berikut:





Gambar 2
Model Penelitian

Sumber: Hasil Kajian Literatur Peneliti, 2024

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang diterapkan pada studi ini yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur yang secara resmi tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2022, yang tersedia pada situs resmi masing-masing perusahaannya dan www.idx.co.id, sejumlah 256 perusahaan. Pengambilan sampel pada studi ini ditetapkan melalui metode *purposive sampling*, dikarenakan tidak seluruh populasi sejalan dengan kriteria penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dan wajib untuk dipenuhi sampel dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 1

Daftar Jumlah Sampel Perusahaan

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dalam rentang 2018 – 2022	256 Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia dalam rentang 2018 – 2022.	(7) Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dalam situs resmi perusahaan ataupun BEI dalam rentang 2018–2022.	(61) Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian dalam rentang 2018-2022.	(100) Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing	(12) Perusahaan
Jumlah Sampel	76 Data
Jumlah Sampel x 5 Tahun	380 Data

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 2

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tax Avoidance (Y)	<i>Tax avoidance</i> merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara meringankan atau mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan secara legal dengan memanfaatkan celah – celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Hama, 2020:10).	$BT D = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ (Wijaya, 2023)	Rasio
Kendala keuangan (X ₁)	<i>Kendala keuangan</i> (kendala keuangan) merupakan keterbatasan perusahaan dalam upayanya untuk memperoleh dana operasional melalui investasi sebagai sumber pembiayaan yang potensial (Foda, dkk, 2022:14).	ZScore = 1,2 X ₁ + 1,4X ₂ + 3,3X ₃ + 0,6X ₄ + 1,0X ₅ (Bayar dkk, 2018)	Rasio
Dewan direksi wanita (Z1)	<i>Dewan direksi wanita</i> diartikan adanya wanita yang menduduki posisi direktur dalam sebuah dewan perusahaan (Nuswantara, dkk, 2023).	<i>Female on Boards</i> $= \frac{\text{Jumlah Wanita di Dewan Direksi}}{\text{Jumlah Dewan Direksi}}$ (Wijaya, 2023)	Rasio
<i>Independent Commissioners</i> (Z2)	Dewan komisaris independen merupakan bagian penting dalam struktur organigram perusahaan yang memegang peran	<i>Independent Commissioners</i> $= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$ (Wijaya, 2023)	Rasio



Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	untuk mengawasi manajemen dalam rangka mempertahankan keberlangsungan perusahaan (Bayhaqi, 2023)		
Profitabilitas (Kontrol)	<i>Return on Asset</i> (ROA) merupakan acuan dalam menghitung jumlah keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan berdasarkan aset yang dimiliki (Sukamulja, 2019:96).	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$ (Wijaya, 2023)	Rasio
<i>Leverage</i> (Kontrol)	<i>Leverage</i> merupakan acuan pengukuran liabilitas pada struktur modal perusahaan (Sukamulja, 2019:97)	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Riguen, dkk, 2020)	Rasio
Ukuran Perusahaan (Kontrol)	Ukuran perusahaan berarti acuan skala yang menentukan besar-kecilnya suatu perusahaan berdasarkan perhitungan terhadap nilai <i>equity</i> , nilai penjualan, jumlah karyawan, nilai aset, dan lainnya (Rahmadani, dkk, 2020).	$Size = \ln(\text{Total Aset})$ (Wijaya, 2023)	Rasio
Jumlah Dewan Komisaris (Kontrol)	Keberadaan dewan komisaris sangat penting sebagai organ dari struktur di perusahaan yang menjadi pihak pengawas. (Bayhaqi, 2023).	Dewan Komisaris = Jumlah Dewan Komisaris dalam Laporan Keuangan (Veres, dkk, 2013)	Nominal

Sumber: Hasil Kajian Literatur Peneliti, 2024

Teknik Analisis

Studi ini yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dalam pelaksanaannya. Di mana statistik, tabel, laporan keuangan, dan data lain yang diperlukan untuk data sekunder penelitian ini diterima secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini dilakukan melalui data sekunder yang diambil dari laporan keuangan atau *annual report* yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan tersedia di situs web perusahaan yang bersangkutan atau Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. SPSS adalah alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji MRA (*Model Regression Analysis*) dan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menyusun persamaan 1 yang terdiri atas pengaruh variabel kendala keuangan terhadap *tax avoidance*. Kemudian hubungan pengaruh seluruh variabel kontrol lainnya terhadap *tax avoidance* akan dimodelkan ke dalam persamaan 2. Persamaan-persamaan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

Persamaan 2:

$$Y = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 JK + e$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

X = Kendala keuangan

ROA = Profitabilitas

DER = Rasio hutang terhadap ekuitas (*Leverage*)

SIZE = Ukuran Perusahaan

JK = Jumlah Dewan komisaris

e = Tingkat kesalahan (*error*)

Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan model regresi yang menguji bagaimana keberadaan faktor moderasi mempengaruhi hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Dalam kaitannya dengan variabel dependen, variabel *moderating* dapat digunakan untuk memperkuat atau memperlemah variabel independen lainnya (Ghozali, 2018:221). Ketika ada komponen interaksi dalam persamaan regresi - yaitu ketika dua atau lebih variabel independen dikalikan, pengujian ini dikenal sebagai MRA, atau uji interaksi. Pada penelitian ini, MRA diterapkan dalam menilai apakah komisaris independen mampu memitigasi dampak dari *kendala keuangan* terhadap *tax avoidance* sebagaimana persamaan 3, dan apakah dewan direksi wanita sebagaimana persamaan 2.

Persamaan untuk hipotesis ke 2 (H_2):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_1 + \beta_3 X_1 Z_1 + e$$

Persamaan untuk hipotesis ke 3 (H_3):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_2 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 X_1 Z_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Tax Avoidance*



- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X_1 = *Kendala keuangan*
- Z_1 = *Dewan direksi wanita*
- Z_2 = *Independent commissioners*
- e = *Error* (tingkat kesalahan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Di bawah ini merupakan hasil analisis data penelitian melalui metode statistika deskriptif.

Tabel 3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Jumlah Data	Nilai Minimum	Nilai Maksimal	Nilai Rata-Rata	Rata- Standar Deviasi
<i>Tax Avoidance</i>	380	-.881	.155	.02191	.051829
Kendala Keuangan	380	.602	59.525	5.20735	5.062393
Jumlah Wanita Dalam Dewan Direksi Komisaris Independen	380	.000	.750	.14078	.172852
Profitabilitas	380	.000	.833	.42051	.120765
Rasio hutang terhadap ekuitas	380	.025	5.443	.82559	.800347
Ukuran Perusahaan	380	24.428	33.655	28.71050	1.655790
Jumlah Dewan Komisaris	380	1	10	4.10	1.851

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS 27, 2024

Tabel 3 menyajikan data dari berbagai variabel yang diambil dari penelitian, dengan data yang diperoleh sejumlah 380 sampel. Variabel dependen *tax avoidance*, yang diwakili oleh simbol (Y) dan diwakilkan dengan *BTD*, memiliki rentang nilai terendah -0,881 hingga nilai tertinggi 0,155. Variabel *tax avoidance* pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,02191 dan standar deviasi sebesar 0,051829. Karena nilai rata-rata variabel *tax avoidance* lebih rendah dari nilai standar deviasi yang diperoleh, maka disimpulkan bahwa sampel penelitian memiliki standar deviasi yang relatif besar.

Variabel *kendala keuangan*, yang diwakili oleh simbol (X) dan diwakilkan dengan *Z-Score*, adalah variabel independen. Nilai rata-rata dari kendala keuangan sebesar 5,20735 menunjukkan bahwa organisasi yang diuji memiliki kondisi keuangan yang stabil atau tidak memiliki keterbatasan keuangan, karena 5,20735 lebih besar dari 2,99. Oleh karena itu, variabel *kendala keuangan* memiliki nilai terendah sebesar 0,602 dan nilai tertinggi sebesar 59,525. Standar deviasi dari variabel batasan keuangan dalam studi ini diperoleh sebesar 5,062393, yang lebih rendah dari nilai rata-rata 5,20735, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel *kendala keuangan* terdistribusi secara merata.

Dengan nilai rata-rata 0,14078, variabel dewan direksi wanita (Z_1) merupakan variabel moderasi pertama. Hal ini menunjukkan bahwa, rata-rata, 14% dari dewan direksi perusahaan terdiri dari perempuan. Mengingat bahwa 195 data perusahaan dalam penelitian ini tidak memiliki dewan direksi wanita, maka variabel *dewan direksi wanita* memiliki nilai tertinggi sebesar 0,750, atau 75%, dan nilai terendah sebesar 0,000. Standar

deviasi variabel dewan direksi wanita adalah 0,172852, yang lebih tinggi dari nilai rata-rata dan menunjukkan tingkat variabilitas data yang signifikan. Hal ini didukung lebih lanjut oleh kesenjangan yang mencolok antara nilai maksimum dan minimum. Karena pada waktu tertentu banyak perusahaan tidak memiliki komisaris independen, variabel moderasi kedua, yaitu komisaris independen yang disimbolkan dengan (Z2), memiliki nilai tertinggi 0,833 dan nilai terendah 0,000. Variabel *comissioners* independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.42051 dan standar deviasi sebesar 0.120765. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi dari variabel ini lebih rendah dari rata-ratanya, yang menunjukkan varians data yang jauh lebih kecil.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan analisis uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Acuan dari metode uji normalitas ini menggunakan batas signifikansi $> 0,05$ yang menunjukkan data terdistribusi secara teratur. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data dianggap tidak memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4

Hasil Uji Normalitas Sebelum Mengeliminasi Data Outlier

		Unstandardized Residual
N		380
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04658767
Most Extreme Differences	Absolute	.222
	Positive	.159
	Negative	-.222
Test Statistic		.222
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27 (2024)

Tabel 4 menyajikan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa hasil signifikansi dari data penelitian didapat sebesar 0,000. Karena angka ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini tidak memiliki distribusi normal. Ghazali (2018) menyatakan bahwa, data tidak terdistribusi secara teratur ketika ada *outliers*. Data dengan nilai yang sangat tinggi atau rendah dikenal sebagai *outliers*. *Boxplot* digunakan dalam penelitian ini untuk mengecualikan *outliers* yang dapat merusak data dan menghasilkan distribusi yang normal. Sisa 380 dari 313 data penelitian diuji ulang untuk mengetahui kenormalannya setelah data yang dianggap *outliers* dieliminasi. Setelah memeriksa data *outliers*, uji normalitas menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Normalitas Setelah Mengeliminasi Data Outlier

		Unstandardized Residual
N		313
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00363009
Most Extreme Differences	Absolute	.038
	Positive	.031
	Negative	-.038
Test Statistic		.038
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27, 2024



Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov setelah mengeliminasi data yang dianggap *outlier* pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil signifikansi dari uji normalitas didapat sebesar 2,000. Dengan nilai tersebut, maka data pada penelitian ini dianggap telah terdistribusi merata dan model regresi mampu diterapkan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari sepuluh dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar dari sepuluh dan nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas pada data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>Dewan direksi wanitas</i>	.496	2.015
Dewan direksi wanita	.959	1.042
<i>Independent Commissioners</i>	.946	1.058
Profitabilitas (ROA)	.512	1.951
<i>Leverage (DER)</i>	.719	1.391
Ukuran Perusahaan	.606	1.651
Jumlah Dewan Komisaris	.612	1.634

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27, 2024

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 6 membuktikan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tidak terdapat multikolinearitas pada seluruh variabel independen dari penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilaksanakan menggunakan metode *Durbin – Watson*. Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai statistik *Durbin – Watson* > dU dan nilai statistik *Durbin – Watson* < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi pada sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 ^a	.949	.948	.003672	1.378

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27 (2024)

Hasil pengujian autokorelasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,378. Nilai ini didapatkan dengan menerapkan *confidence interval* sebesar 5% (0,05) dengan jumlah sampel (n) sebanyak 313, serta *predictors* (k) sebanyak 7, maka di tabel *Durbin – Watson* diperoleh nilai dL 1,7797 dan dU 1,8630. Sehingga didapat DW < dL < dU (1,378 < 1,7797 < 1,8630) maka disimpulkan terjadi autokorelasi positif.

Ghozali (2018) menyatakan bahwa pendekatan *Cochrane Orcutt*, sebuah transformasi dengan autokorelasi dalam bentuk Lagres (*Lag*), mampu diterapkan dalam mengatasi autokorelasi. Temuan uji autokorelasi setelah dilaksanakan transformasi *Cochrane Orcutt* pada sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Cochrane Orcutt

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.935	.933	.00349	1.985

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27 (2024)

Berdasarkan Tabel 8, hasil uji autokorelasi sesudah transformasi *Cochrane Orcutt* didapat nilai DW 1,985. Nilai ini apabila daripada dengan nilai tabel menerapkan serajat kepercayaan 5% (0,05) diperoleh nilai dL 1,7797 dan dU 1,8630. Sehingga didapat kesimpulan bahwa $dU < DW < (4-dU)$ atau $1,8630 < 1,985 < 2,137$ artinya tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Park. Keputusan yang diambil adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak ada heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas dari sampel penelitian ini:

Tabel 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
1 (Constant)	.000
Kendala keuangan	.638
Dewan direksi wanita	.989
Independent Commissioners	.401
Profitabilitas	.145
Leverage	.429
Ukuran Perusahaan	.125
Jumlah Dewan Komisaris	.805

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27, 2024

Berdasarkan Tabel 9, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dengan nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian dalam memastikan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen disebut analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linier berganda pada sampel penelitian ini menunjukkan temuan-temuan sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.012	.004		2.750	.006
	X	.000	.000	.053	2.879	.004
	ROA	.286	.005	.961	52.816	.000
	DER	.001	.000	.043	2.813	.005
	SIZE	.000	.000	-.050	-2.995	.003
	JK	.000	.000	.054	3.275	.001

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27, 2024



Berdasarkan Tabel 10, adanya perhitungan persamaan 1 regresi linear berganda yang dilakukan dengan angka-angka yang tertera pada *unstandardized B* adalah:

$$Y = 0,012 + 0,000X + e.$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan nilai konstanta 0,012, artinya apabila variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka peningkatan akan terjadi pada *tax avoidance* senilai 0,012. Selanjutnya, nilai koefisien regresi pada variabel *kendala keuangan* (X) 0,000. Artinya, setiap peningkatan *kendala keuangan* sebesar 1 satuan akan meningkatkan *tax avoidance* 0,000.

Hasil analisis regresi linear berganda menjelaskan bahwa persamaan 2 regresi linear ini adalah:

$$Y = 0,012 + 0,286ROA + 0,001DER + 0,000SIZE + 0,000JK + e$$

Analisis regresi dengan menerapkan persamaan sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen memiliki nilai konstanta 0,012. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila variabel independen dianggap nol, maka akan terjadi kenaikan penggelapan pajak 0,012. Variabel profitabilitas (ROA) dengan nilai koefisien regresi 0,286. Hal ini menjelaskan bahwa akan terjadi kenaikan *tax avoidance* 0,286 dalam tiap kenaikan satu satuan profitabilitas. Selanjutnya, nilai koefisien regresi pada variabel *leverage* (DER) 0,001. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk setiap kenaikan satu satuan *leverage*, maka *tax avoidance* akan naik sebesar 0.001. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan *tax avoidance* sebesar 0,000 untuk setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan. Kemudian, untuk variabel jumlah dewan komisaris (JK) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa akan terjadi kenaikan *tax avoidance* sebesar 0,000 untuk setiap kenaikan satu satuan jumlah dewan komisaris.

Pada studi ini, uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria pengambilan keputusan, di mana hipotesis akan ditolak jika nilai signifikansi > 0,05. Sebaliknya, hipotesis diterima jika nilai signifikansi < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 11

Hasil Uji t Variabel Independen

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.008	.001		7.437	.000
	X	.003	.000	.672	16.017	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27 (2024)

Berdasarkan Tabel 11, didapatkan nilai t hitung yaitu 16,017 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai t tabel pada penelitian ini yakni 1,96762 maka t hitung > t tabel (16,017 > 1,96762) dan nilai signifikansinya < dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka hasil dari pengujian yang dilaksanakan diantara variabel *kendala keuangan* terhadap *tax avoidance* berpengaruh signifikan mengindikasikan **Hipotesis 1 diterima**.

Uji MRA (Model Regression Analysis)

Pada studi ini, uji MRA dilaksanakan dalam menguji variabel dewan direksi wanita dan *independent commissioners* saat memoderasi *kendala keuangan* terhadap *tax avoidance*. Di bawah ini merupakan hasil uji MRA dalam penelitian ini:

Tabel 12
Hasil Uji MRA Hipotesis 2

	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
Hasil Persamaan 1					
(Constant)	.008	.001		7.437	.000
<i>Kendala keuangan</i>	.003	.000	.672	16.017	.000
Hasil Persamaan 2					
(Constant)	.007	.001		5.499	.000
<i>Kendala keuangan</i>	.003	.000	.679	16.192	.000
Dewan direksi wanita	.008	.004	.082	1.959	.051
Hasil Persamaan 3					
(Constant)	.009	.001		6.266	.000
<i>Kendala keuangan</i>	.003	.000	.591	11.528	.000
Dewan direksi wanita	-.008	.007	-.086	-1.203	.230
FCxFoB	.004	.001	.219	2.885	.004

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27, 2024

Berdasarkan Tabel 12 menjelaskan bahwa persamaan regresi MRA hipotesis 2 pada penelitian ini adalah:

$$Y = 0,008 + 0,003X + e$$

$$Y = 0,007 + 0,003X + 0,008Z + e$$

$$Y = 0,009 + 0,003X - 0,008Z + 0,004XZ + e$$

Dengan membandingkan ketiga persamaan tersebut pada persamaan kedua nilai t hitung dewan direksi wanita yaitu 1,959 dan nilai signifikansi 0,051 > 0,05. Selanjutnya, padapersamaan ketiga nilai t hitung FCxFoB yaitu 2,885 dan nilai signifikansi 0,004 < 0,05 (*pure moderator*). Maka, disimpulkan bahwa variabel dewan direksi wanita mampu menjadi pemoderasi variabel *kendala keuangan* terhadap *tax avoidance* yang mengidikasikan **Hipotesis 2 diterima.**

Tabel 13
Hasil Uji MRA Hipotesis 3

	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
Hasil Persamaan 1					
(Constant)	.008	.001		7.437	.000
<i>Kendala keuangan</i>	.003	.000	.672	16.017	.000
Hasil Persamaan 2					
(Constant)	.003	.003		.967	.334
<i>Kendala keuangan</i>	.003	.000	.676	16.183	.000
<i>Independent Commissioners</i>	.013	.006	.091	2.187	.029
Hasil Persamaan 3					
(Constant)	.016	.004		4.072	.000
<i>Kendala keuangan</i>	-.001	.001	-.267	-1.256	.210



<i>Independent Commissioners</i>	-0.022	.010	-0.156	-2.296	.022
FCxIC	.010	.002	.983	4.523	.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data menggunakan Aplikasi IBM SPSS 27 (2024)

Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan bahwa persamaan regresi MRA hipotesis 3 padapenelitian ini adalah:

$$Y = 0,008 + 0,003X + e$$

$$Y = 0,003 + 0,003X + 0,013Z + e$$

$$Y = 0,016 - 0,001X - 0,022Z + 0,010XZ + e$$

Dengan membandingkan ketiga persamaan tersebut pada persamaan kedua nilai t hitung *independent commissioners* yaitu 2,187 dan nilai signifikansi $0,029 < 0,05$. Selanjutnya, nilai t hitung FCxIC yaitu 4,523 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (*quasi moderator*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen berperan sebagai pemoderasi antara variabel kendala keuangan dan *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa **Hipotesis 3 diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Kendala Keuangan Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kendala keuangan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Teori keagenan yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara prinsipal dan agen, didukung oleh penelitian ini. Namun pada kenyataannya, masalah keagenan sering kali muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, *tax avoidance* adalah pendekatan manajemen pajak yang sah yang memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang relevan. Hubungan antara *kendala keuangan* dan *tax avoidance* dapat muncul karena organisasi yang berada di bawah kendala keuangan akan memanfaatkan *tax avoidance* untuk memperluas sumber pendanaan internal. Pengurangan beban pajak akan berdampak terhadap kenaikan kas. Temuan dalam studi ini selaras dengan studi yang telah dilakukan oleh Oktarina (2023) dan Sadjiarto, dkk (2020), yang menunjukkan bahwa “*kendala keuangan berpengaruh terhadap tax avoidance*.”

Pengaruh Dewan direksi wanita Memoderasi Financial Constraints Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya dewan direksi wanita pada perusahaan mampu memoderasi hubungan kendala keuangan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung teori *nature*, yang menjelaskan bahwa meskipun beberapa tugas dan tanggung jawab antara pria dan wanita dapat dipertukarkan, namun beberapa tugas dan tanggung jawab lainnya tidak dapat dipertukarkan karena adanya perbedaan yang melekat di antara kedua jenis kelamin. Semakin banyak direktur wanita di dalam dewan perusahaan, semakin sering *tax avoidance* dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika perusahaan mengalami *kendala keuangan*, wanita yang menghindari risiko di dewan direksi lebih memilih untuk tidak mengambil risiko dan membuat keputusan yang terburu-buru, terutama ketika menyangkut masalah pajak yang mungkin berdampak pada kebijakan perusahaan. Temuan dalam studi ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Oktarina (2023), Dakhli (2022), dan Liu dkk (2022) yang menyatakan bahwa “*dewan direksi wanita dapat memoderasi kendala keuangan terhadap tax avoidance*”.

Pengaruh Independent Commissioners Memoderasi Kendala keuangan Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menjelaskan keberadaan dewan komisaris independen mampu memoderasi pengaruh kendala keuangan terhadap *tax avoidance*. Jumlah komisaris

independen yang lebih banyak cenderung meningkatkan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat independensi perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah komisaris independen karena semakin banyak komisaris independen yang tidak terkait langsung dengan bisnis, yang menurunkan kebijakan penghindaran pajak. Ketika perusahaan menghadapi *kendala keuangan* dan memiliki praktik *tax avoidance* yang rendah, manajer dapat menangani pajak dengan lebih hati-hati atau bahkan menghindarinya sama sekali karena adanya konflik kepentingan.

Menurut teori keagenan, konflik kepentingan muncul ketika manajemen yang bertindak sebagai agen diharapkan untuk memenuhi kewajibannya, yang meliputi pemenuhan tujuan bisnis untuk memberikan citra positif terhadap kinerja manajemen. Salah satu taktik yang memotivasi pihak manajemen untuk melakukan tindakan ini adalah praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, prinsipal menolak penghindaran pajak karena mereka memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi perusahaan. Menurut teori sinyal, konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan mengirimkan sinyal kepada pihak lain. Sebagai contoh, manajer dapat memperingatkan para pemangku kepentingan melalui laporan keuangan mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pembiayaan internal. Hasil studi ini serupa dengan penelitian yang dijalankan oleh Oktarina (2023) dan Damayanti, dkk (2022) yang menyatakan bahwa “dewan komisaris independen dapat memoderasi kendala keuangan terhadap *tax avoidance*”.

SIMPULAN

Hasil analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kendala keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, yang sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Perbedaan kepentingan antara keduanya membuat *tax avoidance* menjadi strategi dalam manajemen pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh fungsi yang dimainkan oleh perempuan sebagai komisaris independen dan dewan direksi dalam mengurangi keterbatasan keuangan. Mengenai konsekuensi penelitian ini untuk bisnis, mereka harus fokus pada isu-isu termasuk kendala keuangan, jumlah wanita dalam dewan direksi, dewan komisaris independen, profitabilitas, rasio hutang terhadap ekuitas, ukuran perusahaan, dan jumlah dewan komisaris di dalam bisnis. Hal ini dikarenakan metode *tax avoidance* dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk rekomendasi pada penelitian serupa di masa depan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya belum dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa tersebut. Kedua, terdapat masalah dalam kelengkapan laporan tahunan di website Bursa Efek Indonesia maupun di situs resmi masing-masing perusahaan, yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan data dan jumlah sampel menjadi berkurang.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel dengan melibatkan industri lain yang relevan dengan penghindaran pajak di Indonesia, seperti sektor pertambangan. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan yang lebih akurat untuk membantu dalam penelitian atau kebutuhan lain seperti bagi investor.

REFERENSI

- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
- Dakhli, A. (2022). Do women on corporate boardrooms have an impact on tax avoidance?



- The mediating role of corporate social responsibility. *Corporate Governance*, 22(4), 821–845.
- Damayanti, I. G. A. A., Abdi, I. N., & Sukayasa, I. K. (2022). The Effect of Financial Performance on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a Moderation Variable. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 1(4), 1–6.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SSPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hama, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*. Mitra Abisatya.
- Kartini, Y., & Jaya, A. T. (2023). Tingkat Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Masa Pandemi. 8(2), 253–261.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). (2), 2164–2177.
- KNKG. (2013). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Liu, X., Li, M., Tong, J. Y., & Zhang, F. (2022). CFO gender and tax aggressiveness: Evidence from China. *Pacific Basin Finance Journal*, 71, 101679.
- Melia Wida Rahmayani, Wulan Riyadi, & Yogi Ginanjar. (2021). Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 119–130.
- Oktarina, Y. (2023). Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi. *Educoretax*, 3(2), 72–88.
- Pahala, D., Mulyadi, J., & Darmansyah. (2021). Pengaruh ROA, DER, SIZE DAN Sales Growth terhadap Tax Avoidance Dengan Audit Committe sebagai Pemoderasi. *JIsEB*, 2(1), 11–22.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap tax Avoidance, 10(1), 1–18.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Putri, K. K., Surya, A. S. R., & Hanif, R. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Rasio Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *JOM Fekon*, 4(1).
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(7–8), 659–675.
- Robbins, S. P., & Judge, Ti. A. (2015). *Organizationnal Behavior*. Pearson.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., . N., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1).
- Wijaya, K. G. (2023). Pengaruh kualitas audit, praktik corporate governance, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). 5, 455–464.